**Unit 1**

# HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA

**PENDAHULUAN**

B

 uku ini merupakan materi awal dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa Negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum peguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Setelah mempelajari Unit 1 ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

1. Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
2. Menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila
3. Menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana;
4. Menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Sebelum Anda melangkah ke unit berikutnya, pahami betul isi Unit 1 ini, sehingga akan memudahkan Anda memahami unit yang lain tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang disertai dengan rambu-rambu jawaban, serta soal tes formatif dengan kunci jawabannya. Soal-soal ini sebaiknya Anda jawab secara mandiri, dan baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia. Jumlah jawaban mandiri Anda yang benar dihitung dengan rumus yang disediakan dalam buku ini, sehingga Anda secara jujur dapat mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini. Mantapkan lagi pemahaman Anda melalui refleksi, dan saling berdiskusi dengan teman/mahasiswa lain atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini. Selanjutnya, marilah kita mulai belajar dengan menelaah Subunit 1 di bawah ini.



### Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila

Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama membutuhkan perekat, sesuatu yang instrinsik (sesuatu yang mendasar) untuk mempersatukannya. Cliforfford Geertz, seorang pakar ilmu-ilmu sosial mengakui perekta itu sebagai sebuah keharusan agar terbangun bangsa yang kuat, yang dicirikan rasa kebersamaan yang hidup dikalangan warga masyarakatnya. Indonesia, menurut Geertz, masuk dalam kategori sebuah bangsa multicultural yang membutuhkan daya perekat itu. Dan para pendiri bangsa sejak awal sadar betul akan apa yang ditegaskan oleh Geertz dengan menggali nilai-nilai utama yng ada dalam masyarakat Indonesia dan menyarikan nilai-nilai ini sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikannya sebagai pondasi relasi sosial. Sari-sari nilai utama itu tertuang dalam Pancasila. Karena induk dalam pendidikan sejak awal nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai bagian dari upaya pencerdasan bangsa. Artinya, generasi yang diharapkan terbentuk adalah generasi bangsa yang sadar akan kebangsaanya, dan bangga akan nilai-nilai yang dimilikinya, serta menghayatinya dalam kehidupan masyarakat (Sihotang, et.al: 2019).

Salah satu cara untuk membentuk generasi bangsa yang sadar akan kebangsaanya dan bangga akan nilai-nilai yang dimilikinya adalah dengan diadakannya mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Menurut Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016) Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu:

1. Agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (leitmotive) dan bintang penunjuk jalan (leitstar).
3. Agar mahasiswa tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif.

Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa.

Menurut Suwarma dalam (Muchtarom: 2012) Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia. prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non- pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) meliputi keterampilan intelektual (intellectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Menurut Winarno dalam (Muchtarom: 2012) Watak/ karakter kewarganegaraan (civic dispositions) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak/ karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Dengan demikian, seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran. jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial.

Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (mainstream) dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsoen politik dan kering dari jiwa kenegarawanan.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesahatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa.

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.



### Visi dan Misi Pendidikan Pancasila

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

1. Misi Pendidikan Pancasila
2. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
3. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
4. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
5. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: 2016).

### Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
4. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).
5. **Menggali Sumber Sosiologis, Historis, Yuridis dan Politik Pendidikan Pancasila**
6. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Presiden Soekarno pernah mengatakan, ”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang mengungkapkan, “*Historia Vitae Magistra*”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (*common-sense*) adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain
2. Memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing
3. Berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.

### Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: 2016).

### Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya.

Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (*social order*) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negera mencapai masyarakat adil dan makmur (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: 2016).

1. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, Mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat serta mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: 2016).

### Latihan

* + - * 1. Jelaskan konsep dan urgensi Pendidikan Pancasila?
				2. Jelaskan visi dan misi pendidikan pancasila di perguruan tinggi!
				3. Jelaskan tujuan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi!
				4. Jelaskan hakikat pendidikan Pncasila berdasarkan sumber sosiologis, historis, yuridis dan politik!

### Rambu-rambu jawaban soal latihan

1. Uraikan konsep dan urgensi Pendidikan Pancasila berdasarkan informasi yang telah anda peroleh selama proses pembelajaran
2. Uraikan visi dan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berdasarkan materi yang telah dipelajari.
3. Uraikan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berdasarkan materi yang telah dipelajari.
4. Uraikan secara ringkas hakikat pendidikan Pancasila berdasarkan sumber sosiologis, historis, yuridis dan politik

**Rangkuman**

* Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing.
* Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu:
1. Agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (leitmotive) dan bintang penunjuk jalan (leitstar).
3. Agar mahasiswa tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif.
* Visi Pendidikan Pancasila: Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
* Misi Pendidikan Pancasila
1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline), sebagai misi akademik.
* Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:
1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia.
5. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
6. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.
* Melalui pendekatan Historis, Mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain, memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing, berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dan berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.
* Melalui pendekatan sosiologis, Mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia.
* Pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya.
* Melalui pendekatan politik, Mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat serta mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis.

## Tes Formatif

1. Di dalam pembangunan insan Pancasila, salah satu diantara sarana adalah pengendalian diri karena….
a.  Manusia harus mengendalikan diri.         .
b.  Manusia hidup bermasyarakat
c.  Manusia cenderung kelompok
d.  Manusia harus meningkatkan stabilitas
e.   Manusia berkelompok-kelompok.
2. Didalam memandang dan mengartikan Pancasila, maka….
a.   Setiap sila dari Pancasila boleh berdiri sendiri.
b.   Sila pertama berkedudukanlebih tinggi dari sila-sila yang lain.
c.   Kelima sila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.
d.   Sila pertama menurupakan sila yang terpenting.
e.   Pandangan terhadap Pancasila dapat dipersatukan dasar negara.
3. Pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat adalah :
a.   Manusia harus hidup secara teratur
b.   Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak
c.   Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat
d.   Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat
e.   Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang.
4. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti :
a.   Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
b.   Pancasila sebagai ajaran bangsa
c.   Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa
d.   Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan
e.   Sebagai alat peraturan pemerintah
5. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai:
a.  Makhluk sosial
b.  Makhluk pribadi
c.   Makhluk Tuhan
d.  Watak dari suatu bangsa
e.  Kesemuanya itu benar
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan bernafaskan Pancasila berarti:
a.  Mengamalkan Pancasila secara subyektif.
b.  Mengamalkan Pancasila secara teoritis.
c.  Mengamalkan Pancasila secara obyektif            .       .
d.  Mengamalkan Pancasila secara praktis.
e.  Mengamalkan Pancasila secara sekularisme.
7. Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional pada saat ini adalah … :
a.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
b.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
c.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2002
d.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
e.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2004
8. Jika dilihat dari sejarah mengenai Pancasila adalah merupakan:
a.   Jiwa seluruh rakyat Indonesia.
b.  Berjiwa dan semangat Indonesia
c.   Jiwa manusia Indonesia.
d.   Jiwa seutuhnya manusia.
e.   Doktrin
9. Yang merupakan ciri khas demokrasi pancasila adalah:
a.  Pemerintah mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.
b.  Memberi arti yang kuat terhadap manusia pribadi.
c.  Pemerintah merupakan kekuasan yang terbatas dan tidak sewenang-wenang
d.  Menekankan   pada   keselarasan,   keseimbangan,   keserasian   antara   individu   dan masyarakat.
e.   Pemerintah memberikan arti hidup secara damai
10. Tindak lanjut dari pada usaha melaksanakan Pancasila adalah :
a.  Sebagai ajaran yang perlu dipelajari
b.  Untuk difahami dan dimengerti oleh setiap WNI
c.  Untuk memahami, mengerti secara benar dan menghayati serta mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari
d.  Merupakan ilmu yang perlu dikembangkan
e.  Sebagai hak pilih

#  Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila . Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Muchtarom, Muh. 2012. Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran Pkn Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, Dan Civic Skill Di Perguruan Tinggi. Jurnal PKn Progresif, Vol. 7 No. 2. Hlm 120-121.

Sihotang, Kasdin., Mali Benyamin M., Benyamin Molan dan Vinsensius F.K. 2019. Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan. Jakarta: Grafindo. Hlm.11.

# Glosarium

Civic disposition (Watak Kewarganegaraan): sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) : menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral.

Civic skills (Keterampilan kewarganegaraan): meliputi keterampilan intelektual (intellectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Good citizenship: warga negara yang baik

Misi: tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Visi : serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai.